



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP
2021



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CILEGON
TA.2022**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dishub Kota Cilegon	4
1.5 Isu Strategis.....	6
1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	7
1.7 Keuangan	8
1.8 Sistematika Pelaporan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	20
2.3 Perencanaan Kinerja Tahunan.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 Capaian Kinerja.....	23
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	26
3.3 Analisis Keberhasilan Pencapaian Sasaran.....	37
3.4 Realisasi Anggaran.....	37
3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
BAB IV PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	49
4.3 Keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Cilegon.....	50

DAFTAR TABEL

1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan Kota Cilegon Berdasarkan Jenis Golongan	12
1.2. Sarana Prasarana Yang Ada Di Dinas Perhubungan Kota Cilegon.....	13
2.1. Keterkaitan Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Renstra SKPD Priode: 2021-2026.....	18
2.2. Sasaran Strategis Perhubungan Kota Cilegon	19
2.3. Strategis program dan kegiatan	21
2.4. Perjanjian kinerja tahun.....	22
2.5. Perjanjian kinerja perubahan tahun 2021.....	23
2.6. Anggaran perasarana program tahun 2021.....	24
3.1. Interpretasi Pencepaian sasaran	26
3.2. Capaian kinerja tahun 2021 terhadap target	26
3.3. Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2021	27
3.3. Perbandingan realisasi tahun berjalan 2021 dan target jangka menengah	27
3.4. Realisasi nilai lakip dishub kota cilegon tahun 2021.....	28
3.5. Hasil evaluasi (self assesment) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	29
3.6. Realisasi indeks reformasi birokrasi dishub kota cilegon.....	31
3.7. Hasil evaluasi self assesment penilaian mandiri program reformasi birokrasi	31
3.8. Indeks kepuasan masyarakat pada dishub tahun 2021	36
3.9. Nilai survei internal kepuasan masyarakat dishub kota cilegon.....	37
3.10. Realisasi rasio konektivitas wilayah pada dishub tahun 2021.....	38
3.11. Data angkutan kota yang melayani trayek di kota cilegon	38
3.12. Realisasi rasio konektivitas wilayah pada dishub tahun 2021	39
3.13. Batas lingkup v/c ratio untuk tingkat pelayanan dan karakteristik dari mkji 1997	39
3.14. Faktor penghambat dan faktor keberhasilan.....	41
3.15. Realisasi anggaran tahun anggaran 2021.....	42
3.16. Perbandingan capaian kinerja anggaran tahun 2021 dengan 2020.....	47

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia- Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi. Penyusunan LAKIP tahun 2021 sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance), Aspek – aspek Pelayanan Publik (Publik Service Obligation) dan Pemerintahan yang bersih (clean government), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Susunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pada Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Cilegon merupakan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/ kegiatan pada tahun 2021. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2021 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2021 akan menjadi tolak ukur untukpeningkatan kinerja di tahun 2021. Penyusunan Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, Saran dan kritik atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada pelaporan ini, merupakan hal yang dapat memotivasi kami untuk menyusun LAKIP yang lebih baik lagi.

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran /target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang telah disusun secara periodik.

Sistematika penyajian berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Perda Kota Cilegon No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang menyatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Cilegon merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Program Evaluasi, dan kasubag Keuangan. 4 (empat) Bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan membawahi masing-masing 3 Kepala Seksi. Jumlah pegawai Dinas perhubungan Kota Cilegon secara keseluruhan 95 orang PNS, 18 orang Pegawai Non PNS (TKK) dan 146 Orang Pegawai Non PNS (THL).

Sesuai Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kota Cilegon Tahun 2021-2026 yaitu : **“MEWUJUDKAN CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT”** Untuk mendukung keberlanjutan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon maka dirumuskan **“Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2021-2026”**

Misi merupakan pernyataan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan misi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Cilegon mempunyai tugas di Bidang Perhubungan, secara transparan dan akuntabel, yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di jabarkan melalui 2 (dua) Misi sebagai berikut :

Misi 1	Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel
--------	---

Misi 5	Mewujudkan masyarakat berperadaban
--------	------------------------------------

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, secara umum, Dinas Perhubungan Kota Cilegon telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021–2026. Dari hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan, Pada tahun anggaran 2021 Dishub Kota Cilegon memperoleh Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis untuk Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur diukur dengan menggunakan tiga indicator yaitu:

- Nilai Laporan Akuntabilitas Perangkat Daerah Target Kinerja untuk tahun 2021 sebesar point 60 , untuk hasil laporan akuntabilitas tahun 2021 masih dalam tahap/ proses penilaian evaluator., Adapun tahun 2021 dinas perhubungan masih menggunakan penilaian target kinerja tahun 2020, dengan Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Cilegon diperoleh capaian target kinerja sebesar 58.35 dengan Kategori Cc / cukup. berdasarkan self assessment yang didampingi oleh Tim inspektorat & Organisasi Rb untuk Dinas Perhubungan Kota Cilegon mendapatkan nilai 68.22 point.
- Indeks RB perangkat Daerah target kinerja untuk tahun 2021 point 60 ,untuk hasil tahun 2021 masih dalam tahap / proses penilaian evaluator. adapun tahun 2021 dinas perhubungan masih menggunakan penilaian target kinerja di tahun 2020, dengan Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Cilegon diperoleh nilai sebesar 43.12 dengan Kategori C (Buruk)
- Indeks kepuasan Masyarakat target kinerja tahun 2021 sebesar 79.5 point , untuk hasil capaian tahun 2021 masih menunggu informasi dari bagian Organisasi , adapun tahun 2021 dinas perhubungan masih menggunakan penilaian target kinerja di tahun 2020, dengan capaian 79.50 point.

2 Sasaran Strategis untuk meningkatnya kualitas penyelenggaraan

Transportasi Kota yang diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu:

- Rasio konektivitas wilayah Target Kinerja 37.5 %, realisasi 23 % dengan capaian sebesar 61.33 %
- Kinerja lalulintas jalan dengan target kinerja point 0.40 telah tercapai sebesar 0.24 point tingkat pelayanan B

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2021, selama periode ini Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam pembiayaan anggaran sebesar **Rp.56.434.285.331.-** Secara keseluruhan dapat diinformasikan, capaian realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar **77.35%** .terdiri dari tiga (3) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kab / kota , program penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan (LLAJ), program pengelolaan pelayaran.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Cilegon ini disampaikan dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Cilegon, Februari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CILEGON**


H.ANDI AFFANDI S.Sos
NIP.19681006 198803 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah

- 1) Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- 2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- 3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nasional; dan
- 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Cilegon diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP.

Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, bahwa pada lampiran II disebutkan bahwa laporkan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang di percayakan kepada intansi pemerintah atas penggunaan anggaran

Adapun maksud dan tujuan pelaporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon, adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkankinerjanya.
3. Sebagai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perhubungan Kota Cilegon selama kurun waktu 1 tahun (Tahun Anggaran2021).
4. Sebagai capaian dan tolok ukur kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang meliputi *Input* (masukan), *Output* (Keluaran), *Outcome* (Hasil), *Benefit* (manfaat) dan *Impact* (dampak).

1.3. Dasar Hukum

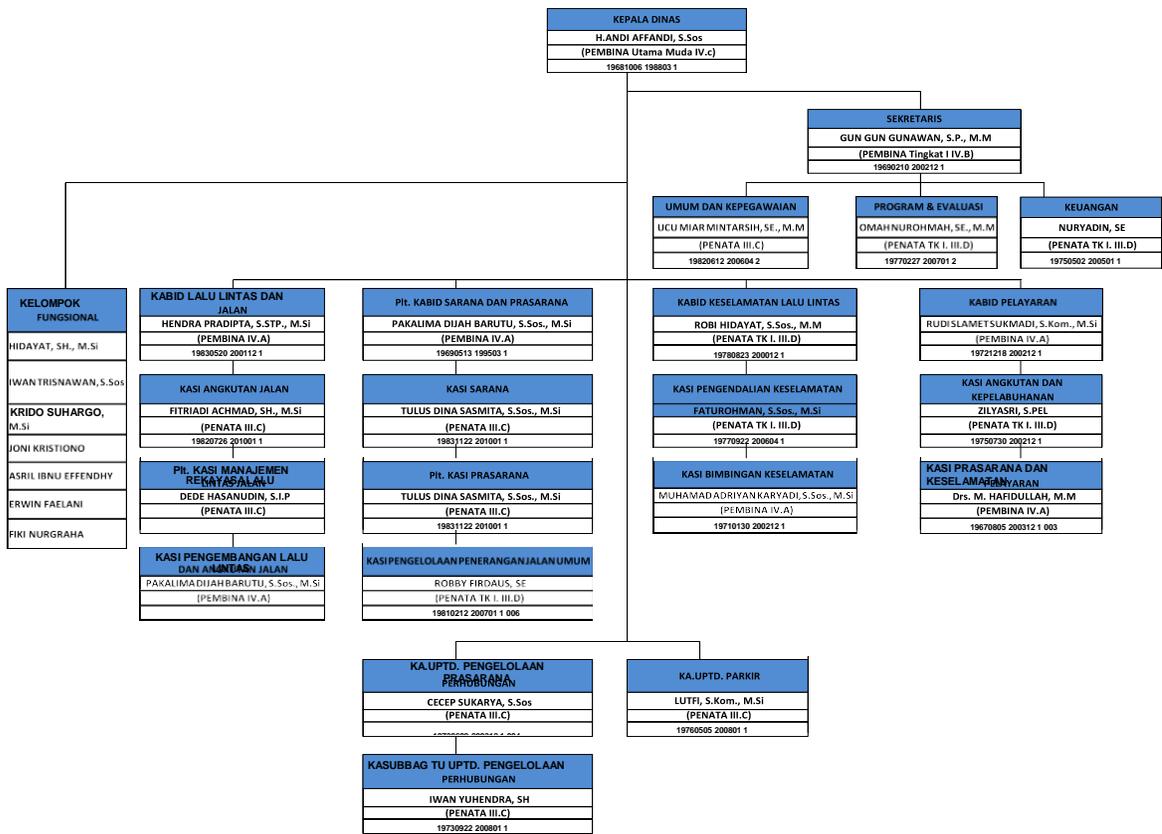
LAKIP Dinas Perhubungan Kota Cilegon ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 2)
8. Perda Kota Cilegon No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon
9. Peraturan WaliKota Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
10. Peraturan Walikota No:060/kep.287/2021 tentang penetapan indikator kinerja utama dan lingkungan pemerintah kota cilegon tahun 2021-2026

1.4. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dishub Kota Cilegon

Dinas Perhubungan Kota Cilegon merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cilegon



1. Tugas Fungsi

Sementara itu Dinas Perhubungan Kota Cilegon mempunyai tugas pokok sesuai dengan Peraturan Walikota No 58 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut

- perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Cilegon memiliki susunan organisasi yang terdiri dari ;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- d. Bidang Pelayanan Perhubungan Laut;
- e. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lalulintas dan Angkutan Jalan;
- f. Bidang Pengendalian Keselamatan Lalulintas;
- g. UPT Terminal; dan
- h. UPT Perparkiran.

Bidang Sekretariat membawahi tiga Sub Bagian yaitu Sub bagian Keuangan, Sub Bagian Program dan Evaluasi serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari Seksi Angkutan Jalan, Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Pengembangan Lalu Lintas, Bidang Pelayanan Perhubungan Laut, Membawahi Seksi Angkutan dan Kepelabuhanan dan Seksi Prasarana dan Keselamatan Pelayaran, Bidang Teknik Sarana dan Prasarana membawahi seksi Sarana, Seksi Prasarana dan Seksi PJU di tambah 2 (dua) UPT; yaitu UPT Terminal dan UPT Parkir.

2. Data Kepegawaian

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perhubungan Kota Cilegon didukung oleh PNS Pejabat Struktural sebanyak 22 (dua puluh Dua) orang, Staf PNS Struktural sebanyak 73 (Tujuh Puluh Tiga) orang, PNS Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebanyak 7 (tujuh) orang, 18 (Delapan Belas) orang TKK (Tenaga Kerja Kontrak), 146 (seratus tujuh orang) orang THL (Tenaga Harian Lepas).

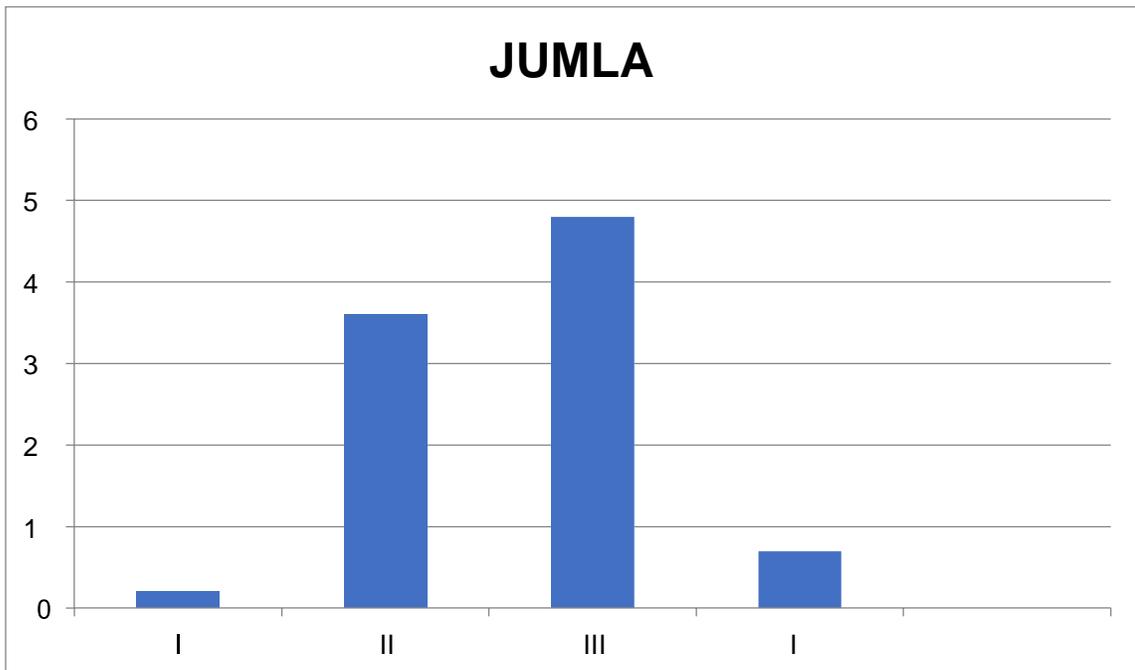
Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan Kota Cilegon Berdasarkan Jenis Golongan

NO	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
1	1				95
	2	36	48	9	

Grafik 1.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan dan Ruang



Sumber: Tahun Desember 2021

Dari grafik diatas terlihat 2 (Dua) pegawai di Dinas Perhubungan Kota Cilegon memiliki pegawai bergolongan I , 2 (dua) , golongan II, 36 (Tiga Puluh Enam) pegawai, golongan III, 48 (Empat Puluh Delapan) pegawai, golongan IV , 9 (sembilan) pegawai.

1.5. Isu Strategis

- Isu strategis Dinas Perhubungan Kota Cilegon berfokus pada optimalisasi daya guna sarana prasarana dan Fasilitas perhubungan, diantaranya :
- Belum optimalnya sarana prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan yang ada di Kota Cilegon.
- Belum tersedianya Palang Pintu Kereta Api dan Early warning system (EWS) yang ada di Kota Cilegon. Saat ini hanya tersedia 4 Palang Pintu dari target 25 lokasi perlintasan sebidang.
- Dalam aspek keselamatan angkutan barang dan orang dibutuhkan pemeliharaan

sarana pengujian kendaraan bermotor yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Cilegon namun masih keterbatasan anggaran untuk dapat melakukan pemeliharaan secara berkala dan pelayanan public dalam penggunaan aplikasi.

- Sementara itu dari aspek sumber daya manusia (SDM) yang merupakan tenaga fungsional Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) juga mengalami kekurangan secara kuantitas dan kualitas.
- Kepadatan lalu lintas di sepanjang jalan arteri primer yang melintasi kota Cilegon pada jam-jam tertentu yang disebabkan penurunan kapasitas jalan sedangkan jalan arteri primer ini merupakan jalan nasional dan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Adapun penyebab penurunan kapasitas jalan yaitu adanya parkir kendaraan tepi jalan umum sepanjang kawasan perdagangan dan juga perkantoran, pola pergerakan angkutan kota yang tidak teratur dalam menaik dan menurunkan penumpang dan adanya persimpangan jalan yang volume pergerakan kendaraannya cukup tinggi.
- segi pelayanan angkutan kota masih mengalami permasalahan antara lain : persaingan bisnis transportasi dan adanya pandemic covid 19 sehingga pelayanan Angkot menjadi tidak maksimal dan berdampak terhadap pelayanan retribusi trayek dan retribusi PKB.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai parkir di tepi jalan umum sehingga menjadi hambatan jalan yang dapat menyebabkan kemacetan
- Pelayanan Perhubungan Laut belum dapat dilakukan karena belum tersedianya sarana dan prasarana pelayaran serta perlu didukung ketersediaan SDM yang memadai.

1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana.

Tabel .1.2

Sarana Prasarana Yang Ada Di Dinas Perhubungan Kota Cilegon

NO	Jenis sarana/prasarana	Jumlah
1	Bangunan Gedung	4 Gedung
2	Kendaraan Roda 4	20 Unit
3	Kendaraan Roda 2	25 Unit
4	Kendaraan Roda 3	1 Unit
5	Komputer /PC	21 Unit
6	Komputer/ Laptop	18 Unit
7	Printer	27 Unit
8	Mesin Tik	3 Unit
9	Fasilitas Perlengkapan Jalan Umum	18 Jenis
10	Halte	11 Unit
11	Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	11 Jenis
12	Palang Pintu Kereta Api	4 Unit
13	Terminal Seruni	1 Unit

1.7. Keuangan

Pada sub bab ini di uraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

1.8. Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2021 adalah :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Latar belakang, Maksud & Tujuan, Dasar hukum, Sistematika Pelaporan, Gambaran umum, Isu strategis.

- **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini disajikan uraian singkat mengenai gambaran Rencana Jangka Menengah OPD yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, sasaran, kebijakan dan program, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Cilegon Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. membandingkan antara target dan realiasi kinerja tahun ini;
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

- **BAB IV PENUTUP**

Mengemukakan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Pada Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 ini, Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Riviui Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon selalu memperhatikan keselarasan antara dokumen perencanaan tingkat SKPD (RPJMD dengan Renstra SKPD, dan RKPD dengan Renja SKPD).

Dalam menjaga keselarasan dan sinergitas berbagai program pembangunan, Dinas perhubungan Kota Cilegon telah memberikan perhatian khusus kepada penerapan kesesuaian perencanaan pembangunan, baik di tingkat kota maupun SKPD. Di sisi lain, Dinas perhubungan Kota Cilegon juga secara intensif memantau kesesuaian alur kerangka logis perencanaan dengan urutan sistematika perencanaan berurutan mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas perhubungan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. “Visi Pembanguna Kota Cilegon adalah : **“ TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN DAN MARTABAT ”**

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam matrik RPJMD Kota Cilegon 2021 - 2026 sebagai berikut

Tabel 2.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD PERIODE : 2021-2026

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	
TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT	1	Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Peningkatan kualitas layanan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalisme aparatur
	2	Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas	Peningkatan kualitas Pendidikan	Terwujudnya kualitas pendidikan yang merata
				Meningkatnya kompetensi literasi masyarakat
	3	Meningkatkan pelayanan Kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu
	4	Mewujudkan kesejahteraan yang merata	Pemerataan kesejahteraan masyarakat	Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat
				Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat
				Meningkatnya investasidan pendapatan daerah
	5	Mewujudkan masyarakat berperadaban	Peningkatan pembangunan dan kualitas masyarakat dan kualitas hidup	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Kota, prasarana, sarana utilitas dan permukiman
				Meningkatnya pelestarian budaya, dan pengembangan destinasi wisata
				Stabilitas pangan, Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
				Meningkatnya kualitasidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga

Dalam kaitanya dengan perwujudan visi misi Kota tersebut, Dinas Perhubungan kota cilegon yang memiliki tupoksi melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan masuk dalam Misi I dan Misi V.

2.1.2. TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR

Sebagai bentuk upaya penjabaran visi dan misi, ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuannya sendiri lebih mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih singkat dari tujuan itu sendiri.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terkait Sektor Perhubungan adalah:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan.

Misi ini memiliki tujuan Peningkatan layanan pemerintahan dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ini diukur dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur dengan indikator Nilai Lakip Perangkat Daerah, Indeks RB Perangkat Daerah, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat.

Misi ini memiliki tujuan Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat dengan menggunakan indikator Rata-rata capaian kinerja jaringan jalan dan transportasi. Tujuan ini diukur dengan sasaran meningkatnya kualitas penataan ruang, infrastruktur kota, prasarana, sarana dan utilitas pemukiman dengan indikator Rasio Konektifitas wilayah dan Kinerja Lalu lintas Jalan.

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Cilegon

No	Sasaran strategi	Indicat or Kinerja	Satua n	Target Tahunan					Keterangan
				1	2	3	4	5	
1	1.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Point	60	62,32	65,25	68,76	68,8	70

		Indeks RB Perangkat Daerah	Point	60	60,42	64,23	66,55	67,75	70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Point	79,5	79,5	79,75	80,1	80,25	80,25
2	.1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan transportasi kota	Rasio Konektivitas Wilayah	%	$\frac{300}{800} = 37,5$	$\frac{400}{800} = 50$	$\frac{500}{800} = 62,5$	$\frac{600}{800} = 75$	$\frac{700}{800} = 87,5$	$\frac{800}{800} = 100$
		Kinerja Lalu Lintas Jalan	Point	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42	0,44

2.1.3. Strategi, program dan Kegiatan

Strategi Dinas Perhubungan Kota Cilegon pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, pembangunan jangka menengah daerah Kota Cilegon sebagaimana tertuang dalam RPJM Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Adapun Rumusan Strategi Tersebut meliputi :

Kebijakan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran adalah :

1. Pengintegrasian layanan dalam satu atap, mengelola pengaduan secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan serta mengukur kepuasan masyarakat secara berkala beserta tindak lanjutnya
2. Peningkatan kinerja jaringan jalan dan transportasi Strategi, Program dan Kegiatan Setelah menentukan tujuan dan sasaran, makalangkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Cilegon dijelaskn dalam tabael berikut.

Table. 2.3
Strategi, Program dan Kegiatan

NO	Sasaran Strategis	Indicator	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1	1.1.1Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalisme Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Perencanaan evaluasi kinerja
		Indeks RB Perangkat Daerah		Administrasi perangkat
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)		Administrasi keuangan
				Pengadaan barang
				Pemeliharaan barang milik
				Administrasi kepagawaian

				Penyediaan penunjang urusan
5	5.1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transportasi Kota	Rasio Konektivitas Wilayah	1. Program penyelenggaraan lalun lintas angkutan jalan (LLAJ) 2. Program pengelolaan pelayaran	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan
		Kinerja Lalu Lintas Jalan		Pengelolaan terminal penumpang tipe c
				Penyediaan izin penyelenggaraan
				Pengujian berkala
				Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan
				Penetapan rencana induk jaringan llaj kabupaten/kota
				Pelaksanaan manajemen dan rekayaa lalu lintas
				Audit dan inpeksi keselamatan LLAJ
				Penertiban izin usaha
				Pembangunan penertiban izin pembangunan dan
				Penertiban izin usaha untuk vadan usaha pelabuhan pengumpan lokal

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mereprestasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun. Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pengembalian tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan kota Cilegon tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	Nilai lakip perangkat daerah	Kategori (D=0,C=1,CC=2, B=3,BB=4, A=5,AA=6)	3
		Target Maturitas SPIP	Lavel	3
2	Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana yang memadai dan handal	Proporsi penggunaan sarana transportasi umum	%	28,57
		Tingkat pemenuhan kelengkapan prasarana perhubungan	%	54,63

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab / kota	Rp 25.961.055.824	APBD
2	Program penyelenggaraan Lalulintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rp 28.845.050.029	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 384.773.290	APBD

Pada tahun 2021, Dinas Perhubungan Kota Cilegon melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja. Namun dalam Perubahan Perjanjian Kinerja ini merubah sasaran strategis, indikator kinerja maupun target kinerjanya dikarenakan masih menggunakan RPJMD 2016-2021.

Pada perubahan perjanjian Kinerja ini sudah mengacu pada RPJMD tahun 2021 -2026 , perubahan perjanjian kinerja juga dirubah pada besarnya jumlah Anggaran yang diperlukan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan yang dilakukan, Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatkan Akuntabilitas pemerintah dan profesionalisme aparatur	Nilai lakip perangkat daerah	Poin	60
		Indeks rb perangkat daerah	Poin	60
		Indek kepuasan masyarakat	Poin	79,5
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi kota	Rasio Konektivitas wilayah	%	300/80 0=37,5
		Kinerja lalu lintas jalan	Poin	0,40

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab / kota	Rp 27.777.949.126	APBD
2	Program penyelenggaraan Lalulintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rp 28.176.362.727	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 384.773.290	APBD

2.3. Perencanaan Kinerja Tahunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi nomor 29 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) memuat komponen Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target yang akan dicapai dalam satu tahun.

Rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis merupakan rencana jangka pendek atau rencana tahunan dan akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Perhubungan untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2021. Pada tahun 2021 telah disusun rencana kinerja yang bersumber anggaran APBD sebagai berikut :

Penetapan kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Cilegon Total Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 56.434.285.331. Alokasi Anggaran per sasaran strategis, Anggaran belanja langsung tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang di alokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah berikut:

Table.2.6
Anggaran Per sasaran, Program Tahun 2021

NO	SASARAN	Program	ANGGARAN	PERSENTASE	KETERANGAN
	1		2	4	5
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.27.873.149.314		Anggaran 1. Sekretariat
2.	Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana yang memadai dan handal	Program Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.28.176.362.727		Anggaran 1. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan LLAJ 2. Bidang keselamatan 3. Bidang TSP
		Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 384.773.290		4. Bidang Pengelolaan Pelayaran
JUMLAH			Rp. 56.434.285.331		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan kinerja instansi pemerintah memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Rencana strategi Dinas Perhubungan Kota Cilegon tahun 2021- 2026.

Dinas Perhubungan kota Cilegon selaku unsur pelaksana pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapankinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurunwaktu tahun 2021 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran kinerja organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai untuk mencapai sasaran dengan program, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi dan mengukur pencapaian kinerja digunakan rumus capaian kinerja, Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan, indikator sasaran dan indikator makro maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1
Interprestasi Pencapaian Sasaran

No	Interval capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % - 100 %	Baik (B)
3	55 % - 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan Rencana strategis dinas perhubungan kota cilegon tahun 2021- 2026 terdapat 2 (dua) sasaran strategis dinas yang di ukur melalui 5 indikator hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapai kinerja untuk memberikan informasi yang transparan, tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Capaian indicator kinerja sasaran Dishub Kota Cilegon merupakan tingkat pencapaian target dari indicator kinerja sasaran yang dicapai pada tahun 2021, diukur dengan membandingkan nilai indicator kinerja sasaran dengan realisasi dan target, hasil pengukuran kinerja sasaran Dishub Kota Cilegon. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Cilegon beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap target 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan profesionalisme Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	60	58.35	97.25
		Indeks RB Perangkat Daerah	60	43.12	71.86
		Indek Kepuasan Masyarakat	79,50	79.50	100
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Transportasi Kota	Rasio Konektifitas Wilayah	$300/800=37.5$	$184/800= 23$ %	61.33
		Kinerja lalulintas jalan (v / c)	0.40	0.24	60

Table 3.3 Perbandingan Realisasi tahun 2021 dengan tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OR KINERJA	2020		Capaian	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		Capaian
			Target	Realisasi				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Lakip Perangkat Daerah	B	Cc		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	60	58.35	97.25
		Target Maturitas SPIP	3	3	100 %		Indeks RB Perangkat Daerah	60	43.12	71.86
							Indeks kepuasan masyarakat (OPD pelayanan public)	79.50	79.50	100 %
2	Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dan handal	Proporsi penggunaan sarana transportasi umum	28.57	33.68	117.88 %	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi kota	Rasio konektivitas wilayah	37.5	23 %	61.33
		Presentase pemenuhan kelengkapan prasarana perhubungan	48.46	45.24	93.25 %		Kinerja lalulintas jalan	0.40	0.24	60

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi tahun Berjalan (2021) dan target jangka menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		Target akhir Renstra	Capaian Kinerja s/d 2020 terhadap target 2026
			Target	Realisasi		
1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan profesionalisme Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	60	58.35	70	97.25
		Indeks RB Perangkat Daerah	60	43.12	70	71.86

		Indek Kepuasan Masyarakat	79.50	79.35	80.25	99.86
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Transportasi Kota	Rasio Konektivitas Wilayah	300/800=37.5	184/800=23 %	61.33	n/a
		Kinerja lalulintas jalan (v /c)	0.40	0.24	80	n/a

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja dapat dilakukan dengan beberapa cara yang pertama adalah dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Hasil pengukuran atas indicator kinerja Dinas Perhubungan Kota Cilegon tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.2.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah

Nilai Lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan Komponen perencanaan 30% pengukuran kinerja 25% pelaporan kinerja 15% dan evaluasi internal 10% capaian kinerja 20 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data n-1) .

Tabel 3.4 Realisasi Nilai Lakip Dishub Kota Cilegon Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	60 point	58.35	97.25

Pada indicator Nilai Laporan Akuntabilitas Perangkat Daerah Target Kinerja untuk tahun 2021 sebesar point 60 , untuk hasil laporan akuntabilitas tahun 2021 masih dalam tahap /proses penilaian evaluator., Adapun tahun 2021 dinas perhubungan masih menggunakan penilaian target kinerja tahun 2020, dengan Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Cilegon diperoleh realisasi kinerja sebesar 58.35 dengan Kategori Cc / cukup dengan realisasi capaian 97.25 %, dimana realisasi tahun 2021 berdasarkan self assessment yang didampingi oleh Tim inspektorat & Organisasi Rb untuk Dinas Perhubungan Kota Cilegon mendapatkan nilai 68.22 point. Dinas perhubungan mendindak lanjuti rekomendasi dari inspektorat kota cilegon untuk melakukan perbaikan – perbaikan terhadap beberapa komponen penilaian, dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.5

Hasil Evaluasi (Self Assessment) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dishub Kota Cilegon Tahun 2020 dan 2021

No	Komponen/Su b Komponen	Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2021	Keteranga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	PERENCANAAN KINERJA	20.60	25.97	
	I.PERENCANAAN STRATEGIS	5.60	7.47	
	a. PEMENUHAN RENSTRA	1.44	1.72	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan
	b. KUALITAS RENSTRA	2.66	3.75	Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan
	c. IMPLEMENTASI RENSTRA	1.50	2.00	Dokumen Renstra belum direviu secara berkala
	II.PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	15.00	18.50	
	a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	3.75	4.00	Telah terdapat publikasi Perjanjian Kinerja
	b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	8.25	10.00	Perjanjian Kinerja telah selaras dengan perencanaan jenjang atasnya dan telah dijabarkan dengan rencana aksi
	c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	3.00	4.50	Rencana Aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam dan pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan
B	PENGUKURAN KINERJA	14.69	18.75	
	I. PEMENUHAN PENGUKURAN	4.06	5.00	Sudah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja
	II. KUALITAS PENGUKURAN	7.50	10.00	Pengukurankinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi (e-SAKIP)
	III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN	3.13	3.75	Belum terdapat pemanfaatan dalam pemberian reward and punishment atas hasil pengukuran capaian kinerja eselon IV keatas
C	PELAPORAN KINERJA	9.26	12.12	
	I. PEMENUHAN PELAPORAN	2.81	2.81	Laporan Kinerja telah diupload di website

	II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	3.75	5.71	Laporan Kinerja sudah menyajikan informasi kinerja yang lengkap dengan data yang lengkap dan valid serta analisa yang optimal
	III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	2.70	3.60	Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kineja telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program

				dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja, namun perlu lebih dioptimalkan
D	EVALUASI INTERNAL	5.83	7.77	
	I. PEMENUHAN EVALUASI	1.71	2.00	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukandan telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, namun belum dilaksanakan secara optimal.
	II. KUALITAS EVALUASI	2.99	3.89	Kualitas evaluasi sudah menunjukkan perbaikan. Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan secara optimal, belum sepenuhnya memberikan alternative perbaikan. Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerjajadan peningkatan kinerja.
	III. PEMANFAATAN EVALUASI	1.13	1.88	Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata.
E	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	7.97	11.38	
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)	2.50	4.50	
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)	5.47	6.88	
	SIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	58.35	68.22	

3.2.2 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indeks Reformasi dan Birokrasi perangkat Daerah yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan kompone pengungkit 60 %, hasil 40 % (jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data n-1)

Tabel 3.6

Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Dishub Kota Cilegon Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60 point	43.12 point	71.86 %

Indeks RB perangkat Daerah target kinerja untuk tahun 2021 point 60 ,untuk hasil tahun 2021 masih dalam tahap / proses penilaian evaluator. adapun tahun 2021 dinas

perhubungan masih menggunakan penilaian target kinerja di tahun 2020, dengan Hasil realisasi Evaluasi Inspektorat Kota Cilegon diperoleh nilai sebesar 43.12 dengan Kategori C (Buruk) yang berarti pelaksanaan program reformasi birokrasi penerapan reformasi birokrasi secara formal terbatas ditingkat instansi dan hanya

mencangkup sebagian kecil unit kerja. ,dengan capaian 71.86 %. Dinas perhubungan kota cilegon mendindaklanjuti rekomendasi dari inspektorat kota cilegon untuk melakukan perbaikan – perbaikan terhadap beberapa komponen penilaian pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, sehingga diperoleh hasil atas Evaluasi Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi berdasarkan *self-assesment* yang dilakukan pada Dishub Kota Cilegon Tahun 2021 sebesar 64.87 poin. Nilai tersebut merupakan akumulasi evaluasi (*Self-Assessment*) dari penilaian mandiri terhadap seluruh komponen area perubahan, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 3.7

Hasil Evaluasi (Self-Assessment) Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi pada Dishub Kota Cilegon Tahun 2021

NO	AREA		BOBOT	2020	2021	KETERANGAN
	NILAI		100	43.12	64.87	
I.	PEMENUHAN		14.60	14.60	10.54	
	MANAJEMEN PERUBAHAN		2.00	0.13	2.00	
	i.	Tim Reformasi Birokrasi	0.40	0.4	0.27	Telah dibuat SK Tim Reformasi Birokrasi oleh Kepala Dinas Telah dibuat Rencana Aksi sesuai dengan unit kerja dan telah dilaksanakan oleh seluruh tim Telah dilaksanakan rapat evaluasi dan monitoring setiap semester
	ii.	Road Map Reformasi Birokrasi	0.40	0.9	0.24	
	iii.	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0.80	0.47	0.50	Kepala Dinas sebagai penanggungjawab pada susunan tim reformasi birokrasi Konsensus tercapai oleh mayoritas koordinator assessor Rencana aksi telah dikomunikasikan dan tindak lanjut telah dilaksanakan Rencana kerja telah dimonitoring setiap triwulan
	iv.	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0.40	0.27	0.20	Pimpinan unit kerja menjadi assessor dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembentukan agent of change sudah ada
	DEREGULASI KEBIJAKAN		1.00	0.50	0.50	
	-	Harmonisasi	1.00	1.00	0.50	Telah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang tidak sinkron di dinas terkait Revisi telah selesai dilakukan
	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		2.00	1.50	1.65	
	i.	Evaluasi Kelembagaan	1.00	0.50	0.65	Hasil Evaluasi Ketepatan fungsi dan ukuran organisasi

ii.	Tindak Lanjut Evaluasi	1.00	1.00	1.00	Hasil evaluasi telah diajukan ke organisasi dan telah dilakukan perubahan oleh organisasi
PENATAAN TATALAKSANA		1.00	0.32	0.63	
i.	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0.50	0.07	0.26	telah disusun SOP sebagai proses bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku
ii.	Keterbukaan Informasi Publik	0.50	0.25	0.38	Ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik, dilihat dari website Dinas Perhubungan dan media sosial lainnya
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		1.40	1.27	1.16	
i.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0.20	0.20	0.13	Telah dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai yang tertuang pada dokumen anjab abk
					Analisis beban kerja dan beban kerja telah dilakukan
					Anjab dan abk telah sesuai
ii.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0.20	0.20	0.20	Kebutuhan pegawai telah disesuaikan dengan kompetensi pegawai yang tertuang di anjab abk
iii.	Penetapan Kinerja Individu	0.40	0.36	0.36	Telah dilakukan penetapan kinerja individu yang terdapat di Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai
iv.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0.20	0.12	0.12	Seluruh aturan telah diimplementasikan
					Monev disiplin pegawai dilakukan setiap bulan
v.	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0.20	0.20	0.15	terdapat dokumen Rencana-Realisasi Kebutuhan Diklat yang diusulkan kepada BPKP. Identifikasi kebutuhan diklat dilakukan pada saat terdapat penawaran diklat untuk disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi calon pesertanya, belum disusun daftar kebutuhan diklat per jabatan
vi.	Sistem Informasi Kepegawaian	0.20	0.20	0.20	Pegawai dapat mengakses melalui SIMAK
PENGUATAN AKUNTABILITAS		2.50	2.31	2.34	
i.	Keterlibatan pimpinan	1.00	1.00	0.84	Pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh penyusunan Renstra Dinas dan terdapat dokumen Renstra yang telah ditandatangani
ii.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1.50	1.31	1.50	Data kinerja dimutakhirkan setiap bulan melalui SIMRAL
PENGUATAN PENGAWASAN		2.20	1.38	1.20	
i.	Gratifikasi	0.30	0.30	0.30	Public campaign anti gratifikasi dilakukan secara berkala tiap bulan
					Gratifikasi dilaporkan setiap bulan
					Kebijakan penanganan gratifikasi adalah pelaporan setiap bulan
ii.	Penerapan SPIP	0.30	0.28	0.23	Dokumen DPR
iii.	Pengaduan Masyarakat	0.50	0.50	0.50	telah dilakukan evaluasi terkait pengaduan masyarakat baik Melalui data SKM

iv.	<i>Whistle Blowing System</i>	0.30	0.00	0.00	
v.	Penanganan Benturan Kepentingan	0.30	0.30	0.00	
vi.	Pembangunan Zona Integritas	0.50	0.00	0.17	sebagian pegawai sudah menandatangani pakta integritas
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		2.50	1.01	1.86	
i.	Standar Pelayanan	0.40	0.18	0.40	telah dibuat maklumat pelayanan dan sudah dipublikasikan di media sosial yang dimiliki
ii.	Budaya Pelayanan Prima	0.40	0.04	0.22	
iii.	Pengelolaan Pengaduan	0.60	0.60	0.55	Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani
iv.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0.70	0.06	0.35	sudah dilakukan survey kepuasan masyarakat
					Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan
v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.40	0.23	0.33	
II.	REFORM	21.70	6.68	13.01	
MANAJEMEN PERUBAHAN		3.00	0.75	1.34	
i.	Komitmen dalam Perubahan	1.50	0.00	0.00	
ii.	Komitmen Pimpinan	1.00	0.25	1.00	belum ada target capaian reformasi dalam dokumen perencanaan
iii.	Membangun Budaya Kerja	0.50	0.50	0.34	membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi melalui pemasangan banner
DEREGULASI KEBIJAKAN		2.00	0.50	0.50	
-	Peran Kebijakan	2.00	0.50	0.50	
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		1.50	0.00	0.75	
-	Organisasi Berbasis Kinerja	1.50	0.00	0.75	
PENATAAN TATALAKSANA		3.75	1.17	2.75	
i.	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0.50	0.17	0.00	
ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1.25	0.00	1.25	
iii.	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2.00	1.00	1.50	Implementasi SPBE dalam bentuk Website, IG yang berfungsi sebagai sarana informasi dan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, akan tetapi belum terintegrasi (parsial)

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		2.00	0.50	1.50	
i.	Kinerja Individu	1.00	0.50	1.00	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai levelnya yang diterapkan dalam SKP
ii.	<i>Assessment Pegawai</i>	0.50	0.00	0.00	
iii.	Pelanggaran Disiplin Pegawai	0.50	0.50	0.50	Pelanggaran disiplin pegawai sudah ditegakan sesuai deng PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai
PENGUATAN AKUNTABILITAS		3.75	0.33	1.67	
i.	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1.00	0.06	0.00	
ii.	Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	1.00	0.33	0.67	
iii.	Pemberian <i>Reward and Punishment</i>	1.00	0.00	1.00	hasil capaian telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward berupa SK Tim dan Pegawai Terbaik
iv.	Kerangka Logis Kinerja	0.75	0.00	0.00	
PENGUATAN PENGAWASAN		1.95	1.35	1.58	
i.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0.75	0.75	0.38	
ii.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0.60	0.60	0.60	
iii.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	0.60	0.60	0.60	semua pengaduan masyarakat ditindak lanjuti
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		3.75	2.09	2.93	
i.	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2.50	0.84	2.09	
ii.	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1.25	1.25	0.84	

3.2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Data yang digunakan menggunakan data n-1 yaitu data tahun 2020.

Tabel 3.8

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dishub Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.50 point	79.50 point	100 %

Indeks kepuasan Masyarakat target kinerja tahun 2021 sebesar 79.50 point , untuk hasil capaian tahun 2021 masih menunggu informasi dari bagian Organisasi , adapun tahun 2021 dinas perhubungan masih menggunakan penilaian realisasi kinerja di tahun 2020 dengan hasil realisasi 79.50 point, dengan capaian 100 %.

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat kota Cilegon yang dilaksanakan oleh Tim Organisasi Setda Kota Cilegon dan Tim Surveyor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melakukan kegiatan pengumpulan data untuk menjamin validasi data yang diinput melalui Aplikasi SPSS, Jumlah Responden yang menjawab kuesioner sebanyak 456 Orang terdiri dari 8 Puskesmas sekota cilegon, 8 Kecamatan sekota cilegon , 9 OPD dan 13 UPT sekota Cilegon dengan target awal peserta sejumlah 12 orang dari masing- masing kerja unit pelayanan. Untuk Dinas Perhubungan pada pelayanan pengujian kendaraan yang melibatkan 12 responden penerima pelayanan public di Kota Cilegon, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut mencapai point 79.50 point dengan predikat BAIK dimana ada beberapa variable yang menjadi penilaian. Adapun nilai masing-masing indikator tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.9

Nilai Survei Internal Kepuasan Masyarakat pada Dishub Kota Cilegon

NO	INDIKATOR	NILAI RATA-RATA	NILAI PER UNSUR	KATEGORI
1.	Persyaratan	3.33	83,25	Baik
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3.58	89,5	Sangat Baik
3.	Waktu Penyelesaian	2,92	73	kurangBaik
4.	Biaya/Tarif	2.83	70,75	Kurang Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,08	77	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3.33	83.25	Baik
7.	Prilaku Pelaksana	3.25	81,25	Baik
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,83	70.75	Kurang Baik
9.	Sarana dan Prasarana	3.50	87.5	Baik
Nilai IKM		3.18	79.75	Baik

Melihat dari table tersebut ada beberapa unsur yang harus diperbaiki atau ditindaklanjuti atas hasil survey tersebut oleh Dinas Perhubungan kota Cilegon yaitu unsur biaya /tarif, waktu penyelesaian dan penanganan pengaduan saran dan masukan.

3.2.4 Rasio Konektifitas Wilayah

Konektifitas wilayah yang diukur dari jumlah angkot yang tersedia dari trayek yang ada dibandingkan dengan jumlah angkot yang melayani seluruh trayek yang dibutuhkan dikota cilegon

Tabel 3.10
Realisasi Rasio konektifitas Wilayah pada Dishub Tahun 2021

Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Keterangan	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian
Rasio Konektifitas Wilayah			%	300/800 = 37.5	184/800= 23 %	61.33 %
	Konektifitas wilayah yang diukur dari jumlah angkot yang tersedia dari trayek yang ada dibandingkan dengan jumlah angkot yang melayani seluruh trayek yang dibutuhkan dikota cilegon	Jumlah angkot yang aktif melayatrayek yang ada pada kab / kota ————— X 100% Jumlah angkot yang melayani seluruh trayek yg dibutuhkan pada kab / kota				

Pada tahun 2021 rasio konektifitas wilayah dengan target 37, 5 % , hasil realisasi 23 % dengan hasil capaian 61,33 % , dimana jumlah angkot yang aktif yang melalui trayek pada kab/kota dibandingkan jumlah angkot yg melayani trayek yang dibutuhkan pada kab / kota (184 / 800). Belum tercapainya target dikarenakan kurang maksimalnya kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan perkotaan dan pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya angkot berhenti beroperasi. Capaian Rasio Konektifitas wilayah tahun 2021 sebesar 61.33 % dengan target jangka menengah sudah tercapai. Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi kota untuk tahun 2021 sebesar 61,33 % dikategorikan cukup.

Tabel 3.11.

Data Angkutan kota yang melayani trayek di kota cilegon

No	Trayek Aktif	Jumlah
1	Cilegon-Merak-PP	48
2	Cilegon-Anyer-PP	49
3	Cilegon-Merak-Pulorida-PP	36
4	Cilegon-Bojonegara-PP	15
5	Cilegon-Pondok Cilegon indah-pp	36
	TOTAL	184

3.2.5 Kinerja Lalu Lintas Jalan

Tolok ukur capaian sasaran strategi meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi kota diukur dengan indicator Kinerja lalulintas jalan (v/c) (Tingkat Pelayanan Jalan), Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 tahun 2006, Tingkat Pelayanan Jalan / Kinerja Jalan / Los diklasifikasikan menjadi 6 , Tingkat Pelayanan A sampai F (MKJI)

Tabel 3.12.

Realisasi Rasio konektifitas Wilayah pada Dishub Tahun 2021

Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Keterangan	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian
Rasio Konektifitas Wilayah			point	0.40	0.24	60
	Tingkat pelayanan ruas jalan kota yang diklasifikasikan menjadi 6, tingkat pelayanan A sampai F, rumusannya (Berdasarkan Survey lapangan)	V/ C Volume lalu lintas kapasitas Jalan				

Tabel.3.13

Batas lingkup v/c Ratio untuk Tingkat Pelayanan dan karakteristik sesuai Tabel sumber MKJI 1997

Tingkat Pelayanan	Penjelasan Kondisi Lalu Lintas (Karakteristik)	Batas Lingkup V/C
A	Kondisi arus lalulintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalulintas rendah	0.00 – 0.20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas	0.20 – 0.44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan	0.45 – 0.74
D	Arus mendekati stabil, kecepatan masih dapat dikendalikan v/c masih dapat ditolerir	0.75 – 0.84
E	Arus tidak stabil kecepatan terkadang terhenti, permintaan sudah mendekati kapasitas	0.85 – 1.00
F	Arus dipaksakan , kecepatanrendah, volume diatas kapasitas , antrian Panjang (macet)	>1.00

Pada tahun 2021 kinerja lalulintas jalan dengan target 0.40 point dengan hasil realisasi 0.24 point dimana keadaan kinerja lalulintas jalan kota Cilegon dalam keadaan stabil tidak termasuk dalam kemacetan / kepadatan. Sebagai sampel berdasarkan hasil survey kendaraan di lapangan yang dilakukan pada saat jam-jam tertentu (*peak hours*) diambil sampel di dua ruas jalan KH.Wasyid dan jalan Jabalintang (kranggot-seruni), dimana berdasarkan tingkat pelayanan ruas jalan kota yang diklasifikasikan menjadi 6 yaitu tingkat pelayanan A sampai dengan tingkat pelayanan F (Manual kapasitas jalan Indonesia) dihasilkan dengan V/C (visi ratio) tingkat pelayanan rata-rata 0.24 point (B) yang berarti stabil , tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas. Kondisi lalu lintas dibatasi dikarenakan pada saat *Peak Hours* ada banyaknya hambatan jalan di samping kanan kiri jalan, yaitu banyaknya pedagang kaki lima, dan parkir tepi jalan yang masih sembarangan.

- Realisasi kinerja lalulintas jalan sebagai indikator dari sasaran meningkatnya kualitas penyelenggraan transportasi kota tahun 2021 sebesar 0,24 poin melebihi dari yang ditargetkan 0,40 point.
- Capaian kinerja lalulintas jalan (Tingkat Pelayanan Jalan) tahun 2021 sebesar 0,24 dibandingkan dengan target jangka menengah 0, 40 sudah tercapai. Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggraan transportasi kota untuk tahun 2021 sebesar 0,24 point (B) yang berarti stabil , tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalulintas. dimana keadaan kinerja lalulintas jalan kota Cilegon dalam keadaan stabil tidak termasuk dalam kemacetan / kepadatan.

Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ada perubahan dalam RPJMD dimana sasaran strategis dan indikator kerjanya berbeda.

3.3 Analisis Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas 1 capaian kinerja dimaksud adalah:

Tabel 3.14
Faktor Penghambat dan Faktor Keberhasilan

No	Sasaran Strategis	Program	Faktor Keberhasilan (Upaya yang Dilakukan)	Faktor Penghambat	Tindakanj ut
1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	telah dilaksanakan upaya-upaya meningkatkan kinerja instansi pemerintah, reformasi birokrasi dan kemudahan akses layanan Administrasi Perhubungan: 1. Penyusunan dokumen perencanaan yang memperhatikan kaidah penyusunan 2. Pembangunan Zona Integritas pada Dishub Kota Cilegon telah dilaksanakan	1. Ada Ketersediaan data berada di lintas Bidang 2. Permintaan data tidak selalu mendapat respon cepat	1. Perbaikan-perbaikan dari hasil rekomendasi Inspektorat
2	meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi kota	Program Pengendalian Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Ilaj) Program Pengelolaan pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan peraturan perundang – undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian di sektor transportasi. • Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas. • Kajian manajemen kebutuhan lalu lintas (traffic demand management) • Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung teknologi intelijen transport sistem (ITS) • Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan. • Monitoring dan Evaluasi terhadap bangunan – bangunan yang mempunyai dampak terhadap keselamatan dan kelancaran lalu lintas • Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. • Ketertiban penyelenggaraan parkir tepi jalan umum yang mendukung kelancaran lalu lintas • Adanya Bimbingan Teknis petugas operator Palang Pintu kereta Api untuk keselamatan lalulintas • Adanya inovasi-inovasi pelayanan Pengujian kendaraan SMART Card • Adanya inovasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Cilegon Terang 	<ul style="list-style-type: none"> • pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya angkot berhenti beroperasi • Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi di jalan; • Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan; • Kurangnya kesadaran dari wajib uji untuk melakukan uji berkala kelaikan kendaraan bermotor • Lambatnya pertumbuhan / terbatasnya jalan di kota, sementara laju pertumbuhan kendaraan tidak terkendali • Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan; • Kurangnya ketersediaan tempat parkir khusus (off street) sehingga menggunakan badan jalan untuk kegiatan perparkiran (on street) • Pelayanan langsung tidak bisa berlangsung dengan optimal karena terkendala dengan protocol kesehatan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan peraturan perundang – undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian • perparkiran Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. • Ketertiban penyelenggaraan parkir tepi jalan umum yang mendukung kelancaran lalu lintas

3.4 Realisasi Anggaran

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang baik tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Sumber pembiayaan Program dan Kegiatan Dishub Kota Cilegon Tahun 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Target (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)
BELANJA	56.434.285.331	43.653.904.019	77.35%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.347.091.448	11.910.267.023	77.61%

Uraian	Target (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	15.347.091.448	11.910.267.023	77.61%
BELANJA LANGSUNG	41.087.193.883	31.743.636.996	77.35%
Belanja Barang dan Jasa	32.499.721.517	26.598.243.696	81.84%
Belanja Modal	8.587.472.366	5.145.393.300	59.92%

Tabel 3.15.
Realiasi Anggaran Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan	56.434.285.331,00	43.653.904.019,00	77,35
2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	55.168.228.717,00	43.178.328.285,00	78,27
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	27.873.149.314,00	22.221.821.711,00	79,72
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.311.958,00	109.818.557,00	90,53
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.691.043,00	51.816.571,00	89,82
2.15.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-skpd	2.495.732,00	1.612.000,00	64,59
2.15.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-skpd	2.495.732,00	2.488.000,00	99,69
2.15.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-skpd	2.495.732,00	2.488.000,00	99,69
2.15.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-skpd	2.495.732,00	876.000,00	35,10
2.15.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	40.244.953,00	37.144.953,00	92,30
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.393.034,00	13.393.033,00	100,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.180.692.734,00	11.873.504.956,00	78,21
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	14.979.681.448,00	11.697.502.023,00	78,09
2.15.01.2.02.04	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd	187.514.709,00	162.558.495,00	86,69
2.15.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran Skpd	13.496.577,00	13.444.438,00	99,61
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	144.900.284,00	143.290.000,00	98,89
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	144.900.284,00	143.290.000,00	98,89
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	807.804.432,00	663.488.878,00	82,13

Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	9.995.700,00	9.985.100,00	99,89
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	65.073.416,00	59.916.794,00	92,08
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.984.883,00	9.984.850,00	100,00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.998.081,00	115.847.057,00	68,15
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	353.027.752,00	286.352.100,00	81,11
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	29.898.000,00	29.814.080,00	99,72
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	169.826.600,00	151.588.897,00	89,26
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.014.271.783,00	1.828.080.655,00	60,65
2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	376.200.000,00	327.200.000,00	86,98
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2.220.159.433,00	1.095.917.500,00	49,36
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	98.700.281,00	98.110.000,00	99,40
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	319.212.069,00	306.853.155,00	96,13
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.754.880.139,00	7.061.729.354,00	91,06
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.599.000,00	4.500.000,00	97,85
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	609.961.095,00	425.499.393,00	69,76
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.140.320.044,00	6.631.729.961,00	92,88
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.287.984,00	541.909.311,00	63,81
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	684.529.800,00	431.011.000,00	62,96
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	72.425.000,00	22.025.000,00	30,41
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	92.333.184,00	88.873.311,00	96,25

Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (llaj)	28.176.362.727,00	21.214.879.163,00	75,29
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan Llj Kabupaten/kota	230.531.144,00	217.712.257,00	94,44
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Llj Kabupaten/kota	230.531.144,00	217.712.257,00	94,44
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/kota	19.152.968.874,00	14.008.297.357,00	73,14
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/kota	229.528.477,00	226.387.720,00	98,63
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/kota	17.365.258.205,00	12.503.301.210,00	72,00
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	3.732.649,00	3.732.649,00	100,00
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.554.449.543,00	1.274.875.778,00	82,01
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	703.376.857,00	670.327.099,00	95,30
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas Utama Dan Pendukung)	299.928.615,00	296.061.865,00	98,71
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.317.961.025,00	1.256.283.278,00	95,32
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	649.963.090,00	642.692.425,00	98,88
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	74.967.476,00	74.467.476,00	99,33
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	551.834.548,00	498.787.466,00	90,39
2.15.02.2.05.10	Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	41.195.911,00	40.335.911,00	97,91
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	5.177.890.434,00	3.847.893.256,00	74,31
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	3.715.511.885,00	3.177.430.756,00	85,52
2.15.02.2.06.04	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/kota	599.770.177,00	569.152.000,00	94,90

Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2.15.02.2.08	Audit Dan Inspeksi Keselamatan Llj Di Jalan	199.971.000,00	199.702.000,00	99,87
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	199.971.000,00	199.702.000,00	99,87
HJ 2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1.393.663.393,00	1.014.663.916,00	72,81
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1.299.992.893,00	970.039.516,00	74,62
2.15.02.2.09.02	Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	93.670.500,00	44.624.400,00	47,64
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	384.773.290,00	217.203.145,00	56,45
2.15.03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha	222.124.198,00	134.594.198,00	60,59
2.15.03.2.05.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/kota Dalam	64.949.704,00	23.499.704,00	36,18

	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2.15.03.2.0 5.02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/kota	157.174.494,00	111.094.494,00	70,68
2.15.03.2.1 2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	80.040.145,00	0,00	0,00
2.15.03.2.1 2.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	80.040.145,00	0,00	0,00
2.15.03.2.1 4	Penerbitan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan Di Pelabuhan Pengumpan Lokal	82.608.947,00	82.608.947,00	100,00
2.15.03.2.1 4.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan Di Pelabuhan Pengumpan Lokal Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	82.608.947,00	82.608.947,00	100,00
2.15.0.00.0 .00.01.000 1	Uptd Pengelolaan Prasarana Perhubungan	403.448.242,00	374.265.234,00	92,77

Kode/ Rekening	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (llaj)	28.176.362.727,00	21.214.879.163,00	75,29
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	703.376.857,00	670.327.099,00	95,30
2.15.02.2.03.0 4	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas Utama Dan Pendukung)	403.448.242,00	374.265.234,00	92,77
2.15.0.00.0.00 1.0002	Upt Parkir	862.608.372,00	101.310.500,00	11,74
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	5.177.890.434,00	3.847.893.256,00	74,31
2.15.02.2.06.0 4	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/kota	862.608.372,00	101.310.500,00	11,74
Total		56.434.285.331,00	43.653.904.019,00	77,35

Dari tabel diatas , dapat dilihat bahwa realisasi belanja DinasPerhubungan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Diinas perhubungan Kota Cilegon adalah sebesar **Rp 43.653.904.019** atau **77.35%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 56.434.285.331**, terdiri dari 3 Program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.873.149.314, realisasi Rp.22.221.821.711, Capaian 79.72 %
- **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Ilaj)** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.176.362.727, realisasi Rp.21.214.879.163 Capaian 75.29%
- **Program Pengelolaan Pelayaran** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 384.773.290, realisasi Rp.217.203.145 Capaian 56.45 %

Ada beberapa kegiatan atau sub kegiatan yang tidak mencapai target atau tidak terealisasi di karnakan atau capaian dibawah 70% di sebabkan:

- Penyediaan bahan logistic kantor dikarenakan pandemic covid 19, berkurangnya kegiatan rapat secara offline.
- Pengadaaan kendaraan dinas oprasionaal atau lapangan, dikarenakan gagal lelang tidak.adanya penyedia yang memasukan penawaran (jenis kendaraan bersifat khusus).
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dikarenakan anggaran antisipasi adanya kenaikan tarif daya listrik.
- Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak, dan perisininan kendaraan dinas oprasional atau lapangan dikarenkan banyak kendaraan yang sudah tidak layak pakai dan akan dipindah tangankan.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dikarenkan masih layak pakai dan tidak terjadi kerusakan.
- Koordinasi dan penyusunan perubahan Dpa-Skpd dikarenakan keterlambatan pengajuan SP).
- Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang atau barang antar kota dalam 1(satu) kabupaten/kota dikarenakan adanya Serapan anggaran rendah karena adanya pandemic covid-19 sehingga kegiatan sosialisasi awak kendaraan umum teladan (AKUT) tidak dapat dilaksanakan
- Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota dikarenakan kegiatan akut tidak dapat dilaksanakan masih pandemic covid 19.

- Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisi badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayaran perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dikarenakan Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pemeliharaan.
- Pengawasan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Tidak terlaksananya sosialisasi perda redistribusi kepelabuhan kepada perusahaan yang memiliki TUKS dikarenakan PPKM.
- Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota dikarenakan penyedia/pihak-pihak tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan penertiban surat perjanjian sewa menyewa dan untuk fasilitas lahan parkir tidak terserap diserap disebabkan belum adanya lahan parkir.
- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rasionaliasai energi listrik pju dikarenakan ada pembatasan pju PPKM- pembayaran listrik PJU ada efisiensi dikarenakan ada kebijakan pembatasan PPKM yang mengharuskan pemadaman lampu yang mengharuskan pemadaman lampu PJU dari jam 18.00 s/d 06.00, mulai maret s/d agustus 2021.
- Penyediaan Angkutan Untuk Jasa Angkutan Orang dan atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota Adanya kebijakan pengurangan operasional angkutan SAUM dikarenakan pandemi Covid -19

3.3.1 Belanja Langsung

Anggaran dan realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
				Tar Get	Realisa si	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	poin	60	58.35	97.25	41.087.193.883	31.743.636.996	77.35%
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	60	43.12	71.86			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	79,50	79.50	100			
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Transportasi Kota	Rasio Konektivitas Wilayah	%	300/800=37.5	184/800=23 %	61.33			
		Kinerja lalulintas jalan (v/c)	Point	0.40	0.24	60			
		Nilai LAKIP Perangkat Daerah							

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp 31.743.636.996. Adapun rincian realisasi belanja langsung tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2021

Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BELANJA LANGSUNG	41.087.193.883	31.743.636.996	77.35%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.499.721.517	26.598.243.696	81.84%
5.2	Belanja Modal	8.587.472.366	5.145.393.300	59.92%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.233.198.125	4.330.398.087	69.47%
5.2.5	Belanja Modal Gedung dan bangunan	2.354.274.241	814.995.213	34.62%

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2021 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal adalah sebesar Rp 31.743.636.996 atau 77.35 % dari pagu anggaran sebesar Rp 41.087.193.883

3.3.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai Dinas Perhubungan Kota Cilegon Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2021

Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.347.091.448	11.910.267.023	77.61%
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	15.347.091.448	11.910.267.023	77.61%

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2021 yang terdiri dari Belanja Pegawai (Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN) adalah sebesar **Rp 11.910.267.023** atau **77.61%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 15.347.091.448**

Tabel.3.19

Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020

NO	PROGRAM	2020						2021		
		PAGU	REALISASI	SISA	%	REGULER	ABT	REALISASI	SISA	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.011.032.402	8.430.753.040	580.279.362	93,56	25.961.055.824	27.873.149.314	22.221.821.711	5.651.327.603	79,72
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.154.595.000	3.070.777.000	83.818.000	97,34	27.973.327.919	26.910.306.113	20.739.303.429	6.171.002.684	77,07
3	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	17.178.665.985	13.923.667.614	3.254.998.371	81,05	-	-	-	-	
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESELAMATAN LALU LINTAS	393.559.027	391.617.915	1.941.112	99,51	-	-	-	-	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	179.850.000	176.250.000	3.600.000	98,00	384.773.290	384.773.290	217.203.145	167.570.145	56,45
6	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN	142.531.222	141.630.322	900.900	99,37	337.724.036	403.448.242	374.265.234	29.183.008	92,77
7	UPT PARKIR	17.833.000	17.833.000	-	100,00	533.998.074	862.608.372	101.310.500	761.297.872	11,74
JUMLAH		30.078.066.636	26.152.528.891	3.925.537.745	86,95	55.190.879.143	56.434.285.331	43.653.904.019	12.780.381.312	77,35

Dari data table diatas capaian kinerja realisasi anggaran pada tahun 2020 dan tahun 2021 terdapat perubahan Program pada Dinas perhubungan kota Cilegon dimana pada tahun Anggaran 2020 masih memakai 5 (lima)program dan 5 (lima) bidang belum menggunakan aturan SIPD 90, dan pada tahun Anggaran 2021 sudah diterapkan SIPD 90 sehingga terdapat perubahan Program di Dinas Perhubungan Kota Cilegon .

- Untuk capaian kinerja realisasi anggaran pada tahun 2020 dengan Pagu keseluruhan Total Rp. 30.078.066.636 realisasinya Rp.26.152.528.891

capaiannya 86.95% , capaian kinerja realisasi anggaran pada tahun 2020 terdiri dari 5 (lima) Program yaitu :

- Program Dukungan pemerintahan dengan pagu Anggaran sebesar Rp 9.011.032.402 dengan realisasi Rp.8.430.753.040 capaian sebesar 93,56 % ,
- Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan pagu Anggaran sebesar Rp 17.178.665.985 realisasi 13.923.667.614 dengan capaian sebesar 81.05 %.
- Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut dengan pagu Anggaran sebesar Rp 179.850.000 realisasi Rp. 176.250.000 dengan capaian sebesar 98 %
- Program Pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan pagu Anggaran sebesar Rp 3,314.959.222, realisasi Rp. 3.230.240.322 dengan capaian sebesar 97.44% ,
- Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas dengan pagu Anggaran sebesar Rp 393.559.027, realisasi Rp.391. 617.915 dengan capaian sebesar 99,51 %.
- Untuk capaian kinerja realisasi anggaran pada tahun 2021 dengan pagu keseluruhan total. Rp. 56.434.285.331 , realisasi Rp.43.653.904.019 dengan capaian sebesar 77.35 % , capaian kinerja realisasi anggaran pada tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) Program yaitu:
 - Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah kab /kota dengan pagu Anggaran sebesar Rp.27.873.149.314 dengan realisasi Rp.22.221.821.711 capaian sebesar 79.72 % ,
 - Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan jalan (LLAJ) dengan pagu Anggaran sebesar Rp 28.176.362.727 dengan realisasi Rp.21.214.879.163 capaian sebesar 75.29 % ,
 - Program Pengelolaan Pelayaran dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 384.773.290 dengan realisasi Rp.217.203.145, capaian sebesar 56.45

Dari hasil analisa perbandingan capaian kinerja realisasi anggaran antara tahun 2020 dan tahun 2021 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah anggaran pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2020, Total anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 30.078.066.636 dan pada tahun 2021 Rp.56.434.285.331, akan tetapi pada capaian realisasi kinerja pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 77.35 % dari tahun 2020 dengan capaian 86.95 % . Berdasarkan table diatas Menunjukkan bahwa hampir seluruh kegiatan dan anggaran tahun 2021 terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan, Ada beberapa yang mempengaruhi kecilnya capaian realisasi pada tahun 2021 antara lain tidak dilaksanakannya beberapa kegiatan dikarenakan pada tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan yang tidak terserap / tdk tercapai target dikarenakan Gagal lelang dan waktu pekerjaan yang sangat terbatas

3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Implementasi pengukuran efisiensi pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon dapat dilakukan melalui perhitungan rasio antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja keseluruhan. Rumus menghitung tingkat efisiensi menurut Mahsun (2009) :

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Keseluruhan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, hasil persentase dikategorikan kedalam beberapa tingkatan:

1. Tingkat pencapaian diatas 100% : tidak efisien
2. Tingkat pencapaian 90%-100% : kurang efisien
3. Tingkat pencapaian antara 80%-90% : cukup efisien
4. Tingkat pencapaian 60%-80% : efisien
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% : sangat efisien

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon adalah sebagai berikut: $\frac{72.71}{100} \times 100\% = 72.71\%$

Dari hasil pengukuran tingkat efisiensi diatas dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian efisiensi Dishub Kota Cilegon sebesar 72.71% atau Tingkat Pencapaian 60-80 % dikategorikan efisien. Selama tahun anggaran 2021, Dishub Kota Cilegon telah melakukan berbagai upaya efisiensi, antarlain: Mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM). Pemakaian listrik seperti penggunaan pendingin ruangan (Air Conditioner), lampu, komputer, laptop digunakan pada saat jam kerja, Alat tulis kantor (ATK) digunakan sesuai kebutuhan. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin., Pengalokasian anggaran (Refocusing dan Rasionalisasi) dilakukan secara efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya bidang perhubungan, juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan berikutnya. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang telah dilakukan dari berbagai kegiatan, yang membandingkan antara rencana, pencapaian kegiatan dengan realisasi sasaran dan anggaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon tahun anggaran 2021 telah **mencapai realisasi anggaran rata-rata 77,35%**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja tahun 2021 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan ditandainya capaian beberapa indikator kinerja yang telah memenuhi target pencapaiannya dan diharapkan melalui berbagai kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan Dinas Perhubungan Kota Cilegon optimis dapat memberikan kontribusi pencapaian program.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi melalui peningkatan kualifikasi dan pelatihan untuk mencapai standar sesuai dengan kebutuhan bidang perhubungan.
2. Penataan Jaringan Lalulintas yang terintegrasi dengan terminal
3. Perlu nya penyusunan Tataran transportasi local (tatralok) Dinas Perhubungan Kota Cilegon
4. Meningkatkan Pagu Anggaran sesuai dengan kebutuhan Dinas Perhubungan
5. Kajian manajemen kebutuhan lalu lintas (traffic demand management)
6. Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung teknologi intelijen transport sistem (ITS)
7. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.

8. Penegakan peraturan perundang — undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian di sektor transportasi.
9. Monitoring dan Evaluasi terhadap bangunan — bangunan yang mempunyai dampak terhadap keselamatan dan kelancaran lalu lintas
10. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas
11. Penerapan kartu uji pada pengujian kendaraan bermotor
12. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
13. Ketertiban penyelenggaraan parkir tepi jalan umum yang mendukung kelancaran lalu lintas.

4.3. Keberhasilan Dinas Perhubungan

Keberhasilan yang telah di capai oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon selama Tahun 2021 yaitu:

- 1). E-System Smart Card untuk menunjang efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Sarana Prasarana
2. Terwujudnya keselamatan lalu lintas palang pintu perlintasan Kereta Api di Kota Cilegon sebanyak 4 titik di Kota Cilegon .

Laporan kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2021 dan kekurangan diharapkan dapat menjadi parameter dan acuan penetapan kebijakan, program dan kegiatan pada waktu mendatang.

Cilegon, Februari 2022
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CILEGON**


H. ANDI AFFANDI S. Sos
NIP. 19681006 198803 1 001